

DR. MARTY NATALEGAWA

Foreign Minister of Indonesia (2009 – 2014)

LONDON
SPEAKER
BUREAU



Topics

- Asia
- Author
- Government
- Politics

DR. RM MARTY M. NATALEGAWA menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia (2009 – 2014). Dia adalah penulis “Does ASEAN Matter? Pandangan dari Dalam” (ISEAS Publishing - 2018).

Ia ikut menulis “Geopolitik dan Perekonomian Indonesia: Dampak dan Respons Kebijakan” (Geopolitik dan Ekonomi Indonesia: Dampak dan Respons Kebijakan) dan melakukan penelitian dengan bank sentral Bank Indonesia Institute tentang isu geopolitik dan ekonomi Indonesia.

Dia adalah anggota Dewan Penasihat Tingkat Tinggi untuk Mediasi Sekretaris Jenderal PBB; Dewan Penasihat Perlucutan Senjata UNSG dan Dewan Pengawas Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB. Dia bertugas di Panel Tingkat Tinggi UNSG tentang Tanggapan Global terhadap Krisis Kesehatan dan Tim Penasihat Eksternal Sesi ke-72 Presiden Majelis Umum PBB.

Juga, antara lain, dia adalah anggota Komite Penasihat Akademik Internasional dari Oxford Centre for Islamic Studies; Dewan Direktur Global Center for Pluralism, Ottawa; Dewan Penasihat Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS – Washington, DC); Komite Penasihat Global Forum Jeju; Badan Penasihat Institut Kebijakan Publik Universitas Australia Barat; dan Dewan Kehormatan Institut Bank Indonesia. Dia juga saat ini adalah Rekan Terhormat Institut Kebijakan Masyarakat Asia, Rekan Tamu Terhormat di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam dan Rekan Tamu di Oxford Centre for Islamic Studies. Dia adalah Ketua Jaringan Pemimpin Asia Pasifik (APLN) untuk non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Ia juga merupakan anggota dari “Kelompok Internasional Orang Terkemuka untuk dunia tanpa senjata nuklir” yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang.

Dr. Natalegawa adalah Wakil Tetap/Duta Besar Indonesia untuk PBB (2007-2009); Duta Besar untuk Inggris dan juga untuk Irlandia (2005-2007). Beliau menjabat dalam berbagai kapasitas di Kementerian Luar Negeri Indonesia antara tahun 1986 dan 2014, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktur Organisasi Internasional, Kepala Staf, dan Juru Bicara Kementerian.

Di dalam ASEAN, beliau berperan penting dalam mendorong Komunitas ASEAN melalui Bali Concord II tahun 2003; berkontribusi dalam memprakarsai KTT Asia Timur, Bali Concord III 2011 tentang Komunitas ASEAN dalam komunitas global bangsa-bangsa, dan “Prinsip Bali” 2011 yang mengatur penyelesaian perselisihan secara damai dan penolakan penggunaan kekuatan di antara negara-negara EAS. Dia adalah penganjur awal peran ASEAN di Indo-Pasifik melalui konsep “keseimbangan dinamis”. Selama ini, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri, beliau aktif mendorong pengelolaan dan penyelesaian potensi konflik di kawasan.

Di PBB, ia menjabat, antara lain, sebagai Presiden Dewan Keamanan pada November 2007 dan Ketua Komite Sanksi Dewan Keamanan di DRC dan Rwanda,

serta Kelompok Kerja Operasi Pemeliharaan Perdamaian. Dia juga menjabat sebagai Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi. Dia memimpin delegasi Indonesia di berbagai negosiasi multilateral, baik di dalam PBB maupun di luarnya. Dia berperan penting dalam mengamankan ratifikasi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) Indonesia pada tahun 2012.

Marty Natalegawa dianugerahi medali Satyalancana Wira Karya dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011. Pada tanggal 17 Agustus 2014, beliau dianugerahi medali Bintang Mahaputra Adipradana. Medali diberikan kepada individu untuk layanan mereka kepada bangsa.

Pada November 2012, dia diangkat menjadi Komandan Ksatria Kehormatan Ordo St. Michael dan St. George (KCMG) oleh Yang Mulia Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Dia telah dikutip sebagai "salah satu pemikir kebijakan luar negeri dan keamanan internasional yang paling dihormati di generasinya, baik di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas".

Dia mendapatkan gelar D.Phil. dari Universitas Nasional Australia; seorang M.Phil. dari Universitas Cambridge; dan gelar BSc (Hons) dari London School of Economics and Political Science (LSE).